

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Oleh :

NOFIAH ISNAINI NASUTION

NIM. 0502172302

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

NOFIAH ISNAINI NASUTION

NIM. 0502172302

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nofiah Isnaini Nasution**
NIM : 0502172302
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 09 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pisang Kipas Gg. Damai No. 5 Kota Pematangsiantar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Nofiah Isnaini Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

Oleh :

NOFIAH ISNAINI NASUTION

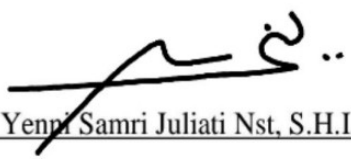
NIM : 0502172302

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

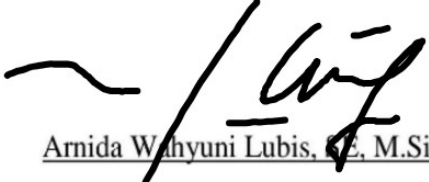
Medan, 10 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, MA

NIP. 19790701 200912 2 003


Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si

NIP. 11600000089

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, MA

NIP. 19790701 200912 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR”** an. Nofiah Isnaini Nasution, NIM. 0502172302 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 24 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 27 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua

Sekretaris

Dr. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, MA
NIDN. 2001077903

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Dr. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, MA
NIDN. 2001077903

Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si
NIDN. 2016068403

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Rahmat Daini Harahap, S.E.I, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UINSU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nofiah Isnaini Nasution (2021), Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Pematangsiantar. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, MA dan Pembimbing II Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si.

Laporan keuangan diperlukan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kerja sehingga turut menentukan bisa tidaknya suatu organisasi untuk terus berlanjut. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang baik dan benar dengan sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Pemerintah daerah juga harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Dan juga hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kuantitatif, jenis data primer dengan metode kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbid Program dan Keuangan, Kasubbid Ekonomi, dan pegawai yang menjabat sebagai Bendahara di 24 OPD Kota Pematangsiantar. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*, sehingga diperoleh 48 orang sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,224 > 2,01410$). Jadi disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,664 > 2,01410$). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Berdasarkan uji simultan (uji F) diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,251 > 3,20$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : *Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas perkenaan-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bukti perjuangan panjang dan jawaban atas doa yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam “*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*” juga penulis sampaikan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sang pejuang sejati yang telah membawa kebenaran.

Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan secara materil maupun nonmateril dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada kedua Orangtua penulis, yaitu Ayahanda Usnan Nasution dan Ibunda Nurzannah. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta dan kasih sayang, serta

dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini, dan yang menjadi alasan penulis untuk masih bertahan di dunia perkuliahan hingga sekarang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.H.I, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHI, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan walaupun melalui *virtual*, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan
7. Terima kasih kepada abang dan adikku tersayang Heru Nuryadi Nasution dan Aynun Nisa Nasution yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada Fikri Akbar Trianto, kamu salah satu penyemangat yang luar biasa untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kita segera berjodoh, dengan hubungan yang lebih baik di mata Allah dan Manusia.
9. Kepada temenku geng squad BRO Niswatun Mujahidah, Maya Sartika Br Sirait, Pazlinna Dewi, Yuli Windriyani, Melani Manurung, dan Nirwana Afiah Hidayati, terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta banyak kenangan menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan

10. Terima kasih untuk teman sekamarku di kos Rini Febriani Sari yang telah memberikan kisah selama kos menjadi berwarna, menjadi kuat di kota orang, juga semangat dan dukungan untuk tetap bertahan hingga terselesaikannya skripsi ini
11. Terimakasih kepada seluruh staff pegawai yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Pemerintah Kota Pematangsiantar
12. Kepada temenku dari TK hingga sekarang Assyaroh Meidini Putriana, dan temen sebangku ku saat Aliyah Cindy Dwi Yanti, terima kasih untuk segala bantuan, masukkan, semangat yang diberikan untuk tetap bertahan menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada temanku di IPSTHREE terima kasih untuk segala dukungan yang di berikan
14. Terima kasih untuk seluruh temenku di AKS-C stambuk 2017, yang sama-sama berjuang untuk meraih sarjana akuntansi
15. Terima kasih untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang banyak membantu penulis dalam hal mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat ridho-Nya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 Juli 2021

Penulis

Nofiah Isnaini Nasution

NIM. 0502172302

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
a. Pengertian Laporan Keuangan	8
b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan	9
c. Komponen Laporan Keuangan	11
d. Kualitas Laporan Keuangan	21
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
f. Landasan Syar'i Laporan Keuangan	25
2. Standar Akuntansi Pemerintahan	26
a. Pengertian Akuntansi	26
b. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	29

c. Kerangka Konseptual SAP.....	30
d. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan.....	31
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	34
B. Penelitian Sebelumnya	36
C. Kerangka Teoritis.....	45
D. Hipotesa.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Data Penelitian	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Pematangsiantar.....	61
B. Deskripsi Data Penelitian.....	62
C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	65
D. Uji Kualitas Data.....	66
E. Uji Asumsi Klasik.....	69
F. Uji Analisis Regresi Berganda	73
G. Uji Hipotesis	74
H. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

Daftar Gambar

Gambar	Hal
1. Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	43
2. Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	68
3. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot.....	69

Daftar Tabel

Tabel	Hal
1. Tabel 1.1 Perkembangan opini Kota Pematangsiantar	3
2. Tabel 2.1 Contoh format Laporan Realisasi Anggaran.....	11
3. Tabel 2.2 Contoh format Laporan Perubahan SAL	13
4. Tabel 2.3 Contoh format Neraca	14
5. Tabel 2.4 Contoh format Laporan Operasional.....	15
6. Tabel 2.5 Contoh format Laporan Arus Kas	17
7. Tabel 2.6 Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas	19
8. Tabel 2.7 Kajian Terdahulu.....	35
9. Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	46
10. Tabel 3.2 OPD Kota Pematangsiantar	48
11. Tabel 3.3 Skala Pengukuran Likert.....	51
12. Tabel 3.4 Indikator Variabel	52
13. Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
14. Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia	61
15. Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	62
16. Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..	62
17. Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	63
18. Tabel 4.6 Statistik Deskriptif	64
19. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas variabel X1	65
20. Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas variabel X2	65
21. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas variabel Y	66
22. Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	67
23. Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	68
24. Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	70
25. Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
26. Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	71
27. Tabel 4.15 Hasil Uji R^2	73
28. Tabel 4.16 Hasil Uji t	73
29. Tabel 4.17 Hasil Uji F	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Tahun 2017. Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.¹ Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.²

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi diperlakukan sebagai alat pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Banyak pihak yang mengandalkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi para pemakainya dan informasi tersebut harus mempunyai nilai, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (tanggung jawab) dalam laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah untuk

¹ Arnida Wahyuni, dan Rinie Utara, *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*, EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No.1, 2018, hal. 1

² MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan: UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (sekretariat Jenderal MPR RI, 2017)

mempertanggung jawabkan segala kegiatan organisasi secara jujur dan terbuka kepada publik atau masyarakat.

Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah mengeluarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karakteristik tersebut merupakan syarat normatif yang diperlukan supaya laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengemukakan bahwa penyebab tidak terpenuhinya syarat kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak tercapainya penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah paling dominan antara lain disebabkan gangguan layak saji aset tetap dineraca pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak akurat dan andal dapat menyebabkan pengambilan keputusan ekonomi yang keliru dan dapat menghambat perencanaan jangka menengah dan pencapaian target-target pembangunan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor terkait kualitas proses penyusunan laporan keuangan adalah kepatuhan dan pemahaman terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).³ Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama dari terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Nasrudin, sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Pemahaman terhadap SAP ini sangat diperlukan, supaya hasil laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas.

Tabel 1.1

Perkembangan opini Kota Pematangsiantar tahun 2015-2019

Entitas Pemerintah Daerah	Opini				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pematangsiantar	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP

Sumber : BPK RI-Sumut (2021)

³ Eriadi, *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*, (Disertasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018), hal. 1-3

Berdasarkan tabel 1.1 diatas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di dua tahun yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Pematangsiantar mendapatkan opini WTP dua tahun berurut setelah ditetapkannya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dengan basis akuntansi berbasis akrual untuk pertama kalinya. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan opini. BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yaitu opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Padahal Pemerintah Kota Pematangsiantar mengharapkan opini WTP. Penurunan opini ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP. Penurunan opini ini menunjukkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Bapak Petrus Wijaya Saragih, selaku Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Balanja Daerah pada BPKD Kota Pematangsiantar, penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Namun masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.⁴

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terjadi pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, masih minimnya pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi. Sumber daya manusia yang berlatar belakang non akuntansi, tetap dianggap mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan modal pelatihan dan bimbingan teknis. Namun belum intensifnya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Belum maksimalnya penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Wijaya Saragih, selaku Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Balanja Daerah pada BPKD Kota Pematangsiantar, Pada tanggal 5 Februari 2021.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap OPD Kota Pematangsiantar, salah satunya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar, ditemukan bahwa bagian keuangan tidak paham akan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketidakpahaman ini berakibat fatal sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Rendahnya tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan ini akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penurunan opini pada tahun 2018 dan 2019 karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP
2. Kurangnya pemahaman pegawai tentang standar akuntansi pemerintahan
3. Minimnya sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berlatar belakang akuntansi
4. Belum intensifnya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai standar akuntansi pemerintahan untuk pegawai yang berlatar belakang non akuntansi

C. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini adalah supaya ruang lingkup peneliti tidak meluas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melihat identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya

manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota pematangsiantar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar?
3. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota pematangsiantar
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota pematangsiantar
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota pematangsiantar

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti/penulis
Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota pematangsiantar
2. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait pentingnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya pada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah “laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.

Laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.¹

Menurut Triyanti laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut, informasi keuangan memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.²

Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Organisasi

¹ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, *Kualitas Laporan Keuangan*, dalam <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/08/kualitas-laporan-keuangan/>, diakses pada 25 januari 2021.

² Triyanti, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Atudi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 13

Pemerintah Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.³

b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:⁴

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
- 4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
- 5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*Stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan

³ Erlina et al, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Jakarta: Salemba Empat, cet. 2, 2015), hal. 23

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 201

- 2) Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
- 3) Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya
- 4) Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan PSAP No. 1 Paragraf 9, Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran

lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.⁵

c. Komponen Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.⁶

Sesuai PSAP 01 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur dari Laporan Realisasi Anggaran yaitu:⁷

- a) Pendapatan-LRA
- b) Belanja
- c) Transfer

⁵ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 12

⁶ Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, PSAP 01 Paragraf 8, hal. 3

⁷ Ibit, PSAP 01 Paragraf 37, hal. 11

- d) Surplus/Defisit-LRA
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggran baik lebih maupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.⁸

Tabel 2.1

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten/Kota
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah		xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx xxx xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx xxx xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus		xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		xxx	xx	xxx
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx xxx	xxx	xx	xxx

⁸ Gita Desipradani dan Zeni Rusmawati, *Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010*, Balance Vol. XIV No. 2, 2017, hal. 16

24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
25	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah		XXX	XX	XXX
29	Pendapatan Dana Darurat		XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Lainnya	XXX XXX XXX	XXX	XX	XXX
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
32	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
33					
34	BELANJA				
35	BELANJA OPERASI				
36	Belanja Pegawai		XXX	XX	XXX
37	Belanja Barang		XXX	XX	XXX
38	Bunga		XXX	XX	XXX
39	Subsidi		XXX	XX	XXX
40	Hibah	XXX XXX XXX	XXX	XX	XXX
41	Bantuan Sosial	XXX XXX XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
43					
44	BELANJA MODAL				
45	Belanja Tanah		XXX	XX	XXX
46	Belanja Peralatan dan Mesin		XXX	XX	XXX
47	Belanja Gedung dan Bangunan		XXX	XX	XXX
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXX	XX	XXX
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX XXX XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Lainnya	XXX XXX XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	BELANJA TAK TERDUGA				
54	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
55	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXXX	XX	XXXX
56	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
57					
58					

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:⁹

- Saldo anggaran lebih awal
- Penggunaan saldo anggaran lebih
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- Dan lain-lain
- Saldo anggaran lebih akhir

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas.

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, PSAP 01 Paragraf 41, hal. 11

Tabel 2.2
Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pemerintah Daerah
 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut, yaitu: Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.¹⁰

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat

¹⁰ Ibit, PSAP 01 Paragraf 49, hal. 12

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.¹¹

Tabel 2.3

Contoh Format Neraca

Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota

Neraca

Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	(xxx)	(xxx)
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21		xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29		xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42			
43			
44			
45			
46			
47			
No.	Uraian	20X1	20X0
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44	DANA CADANGAN		
45			
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx

¹¹ Gita Desipradani dan Zeni Rusmawati, *Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010*, Balance Vol. XIV No. 2, 2017, hal. 17

48	ASET LAINNYA		
49			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	Xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	Xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	Xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	Xxx
56	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxxx	Xxxx
57			
58	KEWAJIBAN		
59			
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
61			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	Xxx
63	Utang Bunga	xxx	Xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	Xxx
66	Utang Belanja	xxx	Xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	Xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	Xxx
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
70			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	Xxx
72	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	Xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	Xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	Xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	Xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	Xxx
77	EKUITAS		
78			
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxxx	xxxx

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan financial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos berikut:

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- Beban dari kegiatan operasional
- Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, bila ada
- Pos luar biasa, bila ada
- Surplus/defisit-LO

Tabel 2.4

Contoh Format Laporan Operasional

Pemerintah Kabupaten/Kota
 Laporan Operasional
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	Xxx
6	PENDAPATAN TRANSFER				
7	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
8	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	Xxx
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
14	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	Xxx
17	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	Xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	Xxx
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
23	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	Xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	Xxx
28	BEBAN				
29	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
30	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	Xxx
31	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
32	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	Xxx
33	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	Xxx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	Xxx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	Xxx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	Xxx
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	Xxx
38	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	Xxx
39	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	Xxx
40	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	Xxx
41	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	Xxx
42	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)				
43	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
44	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	Xxx
45	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	Xxx
46	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	Xxx
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	Xxx
48	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
49	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	xxx	xxx	xxx	Xxx
50	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	xxx	xxx	xxx	Xxx
51	POS LUAR BIASA				
52	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
53	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	Xxx
54	POS LUAR BIASA (62-63)	xxx	xxx	xxx	Xxx
55	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	xxx	xxx	xxx	Xxx

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Tabel 2.5

Contoh Format Laporan Arus Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0

Metode Langsung

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
		XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX

No.	Uraian	20X1	20X0
46	Arus Keluar Kas		

47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	XXX	XXX
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:¹²

¹² Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, PSAP 01 Paragraf 101, hal. 20

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - i. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - ii. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d) Ekuitas akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.6

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN	XXX	XXX
6	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX
7			

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.¹³

d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Dalam hal ini kualitas merupakan tingkat baik buruknya kondisi keuangan organisasi/pemerintahan yang dapat dilihat dari laporan keuangan.

Kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, adalah kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.¹⁴

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :¹⁵

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan, yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback value*)
- b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*)

¹³ Ibit, PSAP 01 Paragraf 106, hal. 21.

¹⁴ Ibit, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah...

¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual Paragraf 35, hal. 10

c) Tepat waktu

d) Lengkap

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur

b) Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

c) Netralitas

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan OPD, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

2) Teknologi Informasi

Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam menyelesaikan tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan data) dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam menyelesaikan tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

3) Peran PPK-SKPD

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa pejabat penatausahaan keuangan SKPD adalah pejabat yang

¹⁶ Febrian Cahyo Pradono Basukianto, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*, hal. 190-191

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain: menyiapkan laporan keuangan SKPD, dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran.

4) Rekonsiliasi

Sesuai peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER/PB/2009 tentang pedoman rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan kuasa bendahara umum negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validasi dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

5) Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Mulyadi (2010:163) dalam penelitian Yenni Samri Juliati Nst dan Amani Raudathul Jannah, Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁷ SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

¹⁷ Yenni Samri Juliati Nasution dan Amani Raudathul Jannah, *Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan*, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 Nomor 1, Desember 2019, hal. 517

f. Landasan Syar'i Laporan Keuangan

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja financial pemerintahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya.¹⁸

Didukung juga oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah r.a yang menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : Tunaikanlah amanah pada orang yang memberikan amanah padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Firman Allah SWT dalam ayat tersebut mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik, dan lainnya. Dalam hal ini, implementasi ayat tersebut berupa

¹⁸ Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Toha Putra, 1996), hal. 296.

¹⁹ HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*.

sikap tanggungjawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik terhadap pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang di sebutkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan berkata jujur (benar). Arti jujur disini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Isi laporan keuangan harus menunjukkan sesuatu yang telah terjadi dan didukung dengan bukti transaksi. Penyajiannya harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Segala informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi tanggung jawab entitas pelaporan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang didalamnya terdapat keandalan laporan keuangan yaitu laporan keuangan tersaji berdasarkan peristiwa yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2006), hal. 825

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.²¹

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI (No. 476/KM.01/1991) dalam buku Muhammad Gede, akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.²²

Selanjutnya pengertian akuntansi juga di jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

²¹ Deddi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal.

²² Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: almahira, 2005), hal. 3

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^{٢٣} وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ق
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمَ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa apabila melakukan utang-piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.²⁴ Dan juga menjelaskan untuk menjaga keadilan dan kebenaran, yang ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Burhan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012), hal. 48.

²⁴ Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, dan Hendra Harmain, *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), hal. 28.

(*accountability*) supaya pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Untuk itu tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggung jawaban (*accountability*).²⁵

b. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.²⁶ Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Sugijanto dalam buku Abdul Halim mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*Commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.²⁷

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses

²⁵ Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Medan: Madenatera, 2019), hal. 4.

²⁶ Deddi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 1.

²⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 33

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.²⁸

c. Kerangka Konseptual SAP

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disebut kerangka konseptual adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).²⁹

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:³⁰

- 1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya
- 2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai standar
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini.

Kerangka konseptual SAP menekankan perlunya mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan

²⁸ Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan* (Bogor : In Media, 2017), hal. 1

²⁹ STIE Bukit Zaitun, *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (2017) dalam <http://stiebz.ac.id/?p=531>, diakses pada 27 januari 2021

³⁰ PP No. 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual Paragraf 1, hal. 1

pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting tersebut meliputi: bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, dan sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.³¹

d. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Benyamin S. Bloom dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan karya Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.³² Dalam hal ini berarti orang yang paham akuntansi pemerintahan adalah orang yang mengerti dan memahami standar akuntansi pemerintahan dengan berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdiri dari kerangka konseptual dan 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), yaitu:

1) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.

2) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran

³¹ Deddi Nordiawan et. Al, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 2, 2007), hal. 124

³² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 50

entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan.

4) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyajian pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk:

- a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan
- b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca
- c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi

9) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan.

11) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit

pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.³³

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Boyatzis dalam Skripsi Rashwan Zuhudy Rafid, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu, yang kausal berkaitan dengan kinerja yang efektif atau superior dalam pekerjaan, seperti motif, sifat,

³³ Anggraini, *Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, hal. 14

keterampilan, aspek seseorang citra diri atau peran sosial, atau pengetahuan yang ia gunakan.³⁴

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting dalam sebuah organisasi. Kualitas sumber daya manusia akan menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Werther dan Davis (1996 : 596) dalam jurnal karya Cornelia J. Benny, sumber daya manusia adalah orang-orang yang siap, mempunyai keinginan, dan mampu untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi.³⁵

Menurut Marwansyah dalam artikel Mayang Wulandari, sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya.³⁶ Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap sumber daya manusia harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaannya seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Desiana dkk, kompetensi dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih hemat. Ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan

³⁴ Rashwan Zuhudy Rafid, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hal. 18

³⁵ Cornelia J. Benny, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi*, Administrasi Pendidikan Vol. III, Nomor 2, Oktober 2005, hal 60

³⁶ Mayang Wulandari, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Solok Selatan)*, (Artikel: Universitas Negeri Padang, 2018), hal. 3

pemahaman mengenai hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Parulian Hutapea dan Thoha Nurianna (2008:28) dalam penelitian Markus Doddy Simanjuntak, mengungkapkan bahwa ada tiga komponen kompetensi sumber daya manusia, yaitu:³⁷

- a. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi:
 1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan
 2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, dan teknik yang baru dalam perusahaan
 3. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan teknik yang tepat dan benar
- b. Keterampilan individu meliputi:
 1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan
 2. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan
- c. Sikap kerja yang meliputi:
 1. Memiliki kemampuan berkreativitas dalam bekerja
 2. Adanya semangat kerja yang tinggi
 3. Memiliki kemampuan dalam perencanaan atau pengorganisasian

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.7
Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
-----	--	---------------------	---------------------	------------------

³⁷ Markus Doddy Simanjuntak, *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Direksi PT. Pertani (Persero) Medan*, Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 4 No. 1, Januari 2020, hal. 19

1.	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY	Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
----	---	--	---	---

				4. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.
2.	Mayang Wulandari (2018)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar

		daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada SKPD kabupaten solok selatan)	laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi	akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten solok selatan.
3.	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana (2014)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Untuk menganalisis adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan	Menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

		pemerintah daerah (Studi kasus pada Dinas - Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)	daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana.	pemerintah kabupaten jembrana 2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana 3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem
--	--	---	--	--

				informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana
4.	Rizki Aulina Nur (2019)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Untuk mengetahui apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten	Berdasarkan hasil uji parsial (t) untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan diperoleh $t_{hitung} >$ t_{tabel} (5,074 > 2,00665). Jadi disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah

			Serdang Bedagai	diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,789 > 2,00665). Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,379 > 2,00665). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. berdasarkan uji simultan (f) diketahui bahwa
--	--	--	----------------------------	---

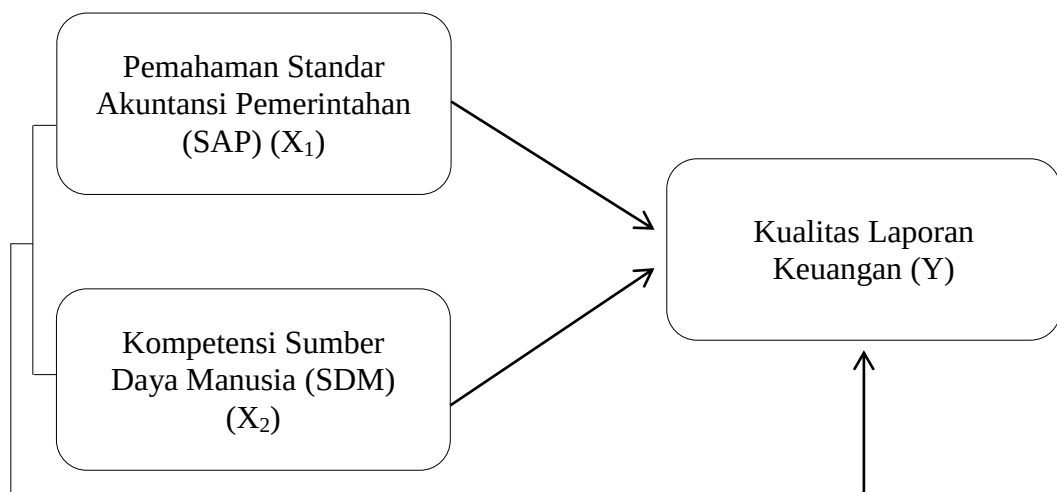
				$f_{hitung} > f_{tabel}$ $(31,029 > 2,78)$, dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Debby Christin Sihasale (2018)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi	Bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi SDM mampu memoderasi (memperkuat)

		keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang)	(SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi.	pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA dengan baik sehingga kualitas laporan keuangan menjadi semakin meningkat. Implikasinya, pemerintah harus meningkatkan pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA agar kualitas laporan keuangan dapat meningkat, dan wajib melibatkan aparatur yang memiliki kompetensi untuk menyusun laporan keuangan agar pengaruh dari pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah
--	--	---	---	--

				daerah.
--	--	--	--	---------

C. Kerangka Teoritis

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukannya pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.

1. Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berarti mengerti dan memahami proses akuntansi sehingga menjadi laporan keuangan, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang yang bertugas untuk menyusun

laporan keuangan menjadi perhatian yang utama, yaitu para pegawai yang mengerti dan memahami akuntansi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana (2014) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Sumber daya manusia yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan informasi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) meneliti di Pemerintahan Daerah Provinsi DIY, dengan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Semakin tinggi pemahaman pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, dan memiliki sumber daya yang berkompeten dalam menjalankan tugas dari jabatannya, maka laporan keuangan yang di hasilkan juga akan berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizki Aulina Nur (2019) bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Hipotesa

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara

logis.³⁸ Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih.³⁹ Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H₀₁ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- H_{a1} : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- H₀₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- H_{a2} : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- H₀₃ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar
- H_{a3} : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar

³⁸ Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 183.

³⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 45

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian konklusif atau penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2011) dalam penelitian Debby Christin Sihasale, penelitian kausal merupakan tipe penelitian dengan karakteristik permasalahan berubah hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.¹ Hubungan timbal balik ada ketika dua variabel antara yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi atau menguatkan satu sama lain.² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala atau satuan angka dan disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) se-Kota Pematangsiantar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul																								

¹ Debby Christin Sihasale, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang)*, (JRMA, Volume 6, No. 1, 2018), hal. 6

² Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung : Citapustaka Media, 2014), hal. 86

Tabel 3.2
OPD Kota Pematangsiantar

No	Organisasi Pemerintah Daerah
1	Inspektorat
2	Sekretaris DPRD
3	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Kepegawaian daerah
8	Dinas Pendidikan
9	Dinas Kesehatan
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
11	Dinas Bina Marga dan Pengairan
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketenagakerjaan
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23	Dinas Pariwisata
24	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Kecamatan Siantar Utara
26	Kecamatan Siantar Selatan
27	Kecamatan Siantar Timur

28	Kecamatan Siantar Barat
29	Kecamatan Siantar Sitalasari
30	Kecamatan Siantar Marimbun
31	Kecamatan Siantar Marihat
32	Kecamatan Siantar Martoba

Sumber : Portal Resmi Pemerintah Kota Pematangsiantar

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁶ Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*, atau biasanya disebut pengambilan sampel dengan maksud tertentu. Pengambilan sampel seperti ini adalah dengan cara memilih yang menjadi anggota sampel, sehingga sampel yang dipilih dapat diharapkan mengekspresikan apa yang dikandung populasi.⁸ Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan pengecualian seluruh kantor kecamatan yang terdapat di Kota Pematangsiantar. Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 24 OPD yang akan peneliti teliti. Dari setiap OPD diambil 2 orang pegawai yang memenuhi kriteria untuk di jadikan responden. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $24 \times 2 \text{ orang} = 48 \text{ responden}$.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari data perusahaan. Menurut Margono dalam buku Ahmad Tanzeh, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hal. 174

⁷ Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung : Citapustaka Media, 2014), hal. 106

⁸ Sakti silaen, *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 157

menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris.⁹

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, sehingga pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara si peneliti dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel, yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹¹

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Metode Angket (Kuesioner). Metode angket (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang

⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 100

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hal. 172

¹¹ Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 122

menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).¹² Kuesioner yang digunakan berasal dari kuesioner penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi dan hasil pemikiran peneliti.

Skala Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Skala Likert. Skala likert digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon terhadap skala ukur yang disediakan.¹³ Skor yang diberikan untuk masing-masing respon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Skala Pengukuran Likert

Respon	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan dalam mengoperasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁴ Menurut Suryabrata dalam buku Asrof Syafi'i, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian,

¹² Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 76

¹³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hal. 146

¹⁴ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...*, hal. 126

sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti.¹⁵

Tabel 3.4
Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Ukur
1.	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.	1. Penyajian laporan keuangan 2. Laporan realisasi anggaran berbasis kas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan 5. Akuntansi persediaan 6. Akuntansi investasi 7. Akuntansi aset tetap 8. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan 9. Akuntansi kewajiban 10. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi	Skala Likert

¹⁵ Ibit., hal. 127

			akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan 11. Laporan keuangan konsolidasian 12. Laporan operasional	
2.	Kompetensi Sumber daya Manusia (X2)	Ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Skala Likert
3.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Skala Likert

Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Nama lain dari variabel ini adalah variabel anteseden.¹⁶ Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X1) dan kompetensi sumber daya manusia (X2).

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi.¹⁷ Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun keadaan pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁸

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data (mean, median, dan modus), ukuran penyebaran data (standar deviasi, dan varians), tabel, serta grafik (histogram, pie, dan bar).

Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi

¹⁶ Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 66.

¹⁷ Ibit

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 244

dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi.¹⁹

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana $df = n-2$ dengan sig 5%. Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka valid.²⁰

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka reliabel.²¹

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hal. 142-143

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press, 2015), hal. 192

²¹ Ibit, hal. 193

Smirnov. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, tapi jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.²²

b. Uji Multikolenieritas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dikatakan terdapat masalah multikolenieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* atau nilai VIF < 10 tidak terdapat masalah multikolenieritas yang serius.²³

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya). Model regresi dikatakan heteroskedastisitas jika tingkat signifikansi < 0,05 dan jika tingkat signifikansi > 0,05 maka model regresi homoskedastisitas.²⁴

4. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Uji regresi linear berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan:²⁵

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

²² V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press, 2015), hal. 52-55

²³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Keempat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 121

²⁴ Rochmat Adi Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS*, (Ponorogo: CV Wade Group, 2017), hal. 63-65

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, ... , hal. 144-149

β_1, β_2	: Koefisien regresi X_1, X_2
X_1	: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
X_2	: Kompetensi Sumber Daya Manusia
ε	: Tingkat kesalahan (<i>error</i>)

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)

Koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan (R^2) menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara variabel independen (Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia) dalam menjelaskan variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen.²⁶ Pengujian ini dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas (X) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), bentuk pengujian:

H_0 : X_1 dan $X_2 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

H_a : X_1 dan $X_2 \neq 0$, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

Selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan membandingkan tingkat signifikansi (α) 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dari t-hitung yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

²⁶ Haslinda dan Jamaluddin, *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah daerah Kabupaten Wajo*, Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban : Vol. II No.1, Juli 2016

Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Uji F (Uji Simultan)

Uji regresi simultan dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.²⁷ Bentuk pengujian:

H_0 : X_1 dan $X_2 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

H_a : X_1 dan $X_2 \neq 0$, maka terdapat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Nilai F-hitung nantinya akan dibandingkan dengan nilai F-tabel dengan tingkat signifikan (α) 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dari F-hitung yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

²⁷ Anggraini, *Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, hal. 30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Pematangsiantar

1. Gambaran Umum Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar ialah Kota Madya tingkat II dan juga termasuk kota terbesar kedua di provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Kota Pematangsiantar berada di tengah-tengah Kabupaten Simalungun, dan secara geografis terletak di bagian tengah Sumatera Utara, terletak pada garis 2° 53' 20" Lintang Utara (LU) dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35" Bujur Timur (BT) pada peta bumi. Wilayah administrasi di Kota Pematangsiantar terbagi dalam 8 Kecamatan dengan luas wilayah administrasi Kota Pematangsiantar adalah 79,971 km², yaitu : Siantar Barat luas 3,205 Km² atau 4,01%, Siantar Utara luas 3,650 Km² atau 4,56%, Siantar Selatan luas 2,020 Km² atau 2,53%, Siantar Timur luas 4,250 Km² atau 5,65%, Siantar Sitalasari luas 22,723 Km² atau 28,41%, Siantar Marimbun luas 18,006 Km² atau 22,52%, Siantar Marihat luas 7,825 Km² atau 9,78%, dan Siantar Martoba luas 18,022 Km² atau 22,45%.

Tata letak dari Kota Pematangsiantar juga tergolong strategis, karena letak-letak kantor pemerintahan, pusat perindustrian, pusat perdagangan, perhotelan dan sebagainya sangat berdekatan, sehingga dapat di akses dengan mudah dan juga sarana transportasi yang memadai. Kota pematangsiantar terdiri dari berbagai macam agama, yaitu islam, kristen protestan, katolik, hindu, dan Budha. Bukan hanya itu, Kota Pematangsiantar secara sosial juga terdiri dari berbagai macam suku yaitu batak Toba, Simalungun, Karo, Jawa, Minang, Melayu, Tionghoa, Mandailing dan lainnya.

Pada tahun 1970-an Kota Pematangsiantar mendapat predikat sebagai kota pendidikan di Propinsi Sumatera Utara. Dari tahun ke tahun jumlah sekolah semakin meningkat mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia untuk memajukan Kota Pematangsiantar ke arah yang lebih baik. Menurut data dari Dinas Pendidikan tahun 2013, Kota Pematangsiantar memiliki 160 Sekolah

Dasar (SD), 43 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 28 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 7 Universitas atau Akademi.

Kota pematangsiantar memiliki sarana dan prasarana kesehatan sebagai penunjang kesehatan masyarakat yaitu 1 unit Rumah Sakit Umum, 6 unit Rumah Sakit Swasta, 17 unit Puskesmas, 10 unit Puskesmas Pembantu, 19 unit Balai Pengobatan Umum (BPU) Swasta, 241 unit Posyandu, 29 unit Apotek, dan 39 unit Klinik Keluarga Berencana.

2. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Pematangsiantar

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima dalam rangka mendukung perwujudan Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju, dan Jaya.

b. Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Meningkatkan kualitas administrasi perekonomian, pembangunan, dan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas
3. Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik dan efisien

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Pematangsiantar. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbid Ekonomi, dan pegawai yang menjabat sebagai Bendahara yaitu berjumlah 48 orang.

Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuat deskripsi profil responden dengan karakteristik data sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	25	52.1	52.1	52.1
Valid Perempuan	23	47.9	47.9	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang dengan persentase 52,1%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 23 orang dengan persentase 47,9%.

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4.2**Data Responden Berdasarkan Usia**

Usia				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<25	6	12.5	12.5	12.5
25-35	15	31.3	31.3	43.8
Valid 36-50	23	47.9	47.9	91.7
>50	4	8.3	8.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berusia dibawah 25 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 12,5%, responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 31,3%, responden yang berusia 36-50 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 47,9%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 8,3 %.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3**Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMP/SMA	6	12.5	12.5	12.5
Diploma	11	22.9	22.9	35.4
Valid S1	24	50.0	50.0	85.4
S2	7	14.6	14.6	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan SMP/SMA sebanyak 6 orang dengan persentase 12,5%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 11 orang dengan persentase 22,9%, responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 orang dengan persentase 50,0%, dan responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang dengan persentase 146%.

4. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.4**Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Latar Belakang Pendidikan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Akuntansi	11	22.9	22.9	22.9
Manajemen	14	29.2	29.2	52.1
Ilmu Ekonomi	7	14.6	14.6	66.7
Valid Hukum	6	12.5	12.5	79.2
Teknik	5	10.4	10.4	89.6
Lain-lain	5	10.4	10.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 11 orang dengan persentase 22,9%, responden yang berlatar belakang manajemen sebanyak 14 orang dengan persentase 29,2%, responden yang berlatar belakang ilmu ekonomi sebanyak 7 oarng dengan persentase 14,6%, responden yang berlatar belakang hukum sebanyak 6 orang dengan persentase 12,5%, responden yang berlatar belakang teknik sebanyak 5 orang dengan persentase 10,4%, dan responden yang memiliki latar belakang lainnya sebanyak 5 orang dengan persentase 10,4%.

5. Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<1 Tahun	4	8.3	8.3	8.3
1-5 Tahun	20	41.7	41.7	50.0
Valid 6-10 Tahun	19	39.6	39.6	89.6
>10 Tahun	5	10.4	10.4	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden yang telah bekerja selama kurang dari 1 tahun sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 8,3%, responden yang telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 20 orang dengan tingkat persentase 41,7%, responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 19 orang dengan tingkat persentase 39,6%, dan responden yang telah bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase 10,4%.

C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi

sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian yang diolah :

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	48	30	47	39.65	3.485
Kompetensi Sumber Daya Manusia	48	34	50	41.46	3.770
Kualitas Laporan Keuangan	48	32	50	41.44	3.752
Valid N (listwise)	48				

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 48 orang, untuk X1 responden memiliki nilai minimum 30 dan nilai maximum 47, nilai rata-rata X1 sebesar 39,65 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata 3,485. X2 responden memiliki nilai minimum 34 dan nilai maximum 50, nilai rata-rata X2 41,46 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata 3,770. Dan Y responden memiliki nilai minimum 32 dan nilai maximum 50, nilai rata-rata Y 41,44 dengan persebaran atau penyimpangan rata-rata 3,752.

D. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitaas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel (dengan sig. 0,05) maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Tapi, jika apabila nilai r hitung < r tabel (dengan sig. 0,05) maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel X1

No. Pertanyaan	<i>Corrected Item</i>	r table	Keterangan
1	0,587	0,284	Valid
2	0,513	0,284	Valid
3	0,618	0,284	Valid
4	0,576	0,284	Valid
5	0,415	0,284	Valid
6	0,611	0,284	Valid
7	0,670	0,284	Valid
8	0,482	0,284	Valid
9	0,607	0,284	Valid
10	0,390	0,284	Valid

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,284.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel X2

No. Pertanyaan	<i>Corrected Item</i>	r table	Keterangan
1	0,761	0,284	Valid
2	0,644	0,284	Valid
3	0,815	0,284	Valid
4	0,738	0,284	Valid
5	0,767	0,284	Valid
6	0,773	0,284	Valid
7	0,691	0,284	Valid
8	0,569	0,284	Valid
9	0,419	0,284	Valid

10	0,768	0,284	Valid
----	-------	-------	-------

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,284.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Y

No. Pertanyaan	<i>Corrected Item</i>	r tabel	Keterangan
1	0,320	0,284	Valid
2	0,362	0,284	Valid
3	0,721	0,284	Valid
4	0,772	0,284	Valid
5	0,458	0,284	Valid
6	0,710	0,284	Valid
7	0,634	0,284	Valid
8	0,520	0,284	Valid
9	0,740	0,284	Valid
10	0,706	0,284	Valid

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan hasil validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,284.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	N of Items
X1	0,729	10
X2	0,861	10
Y	0,798	10

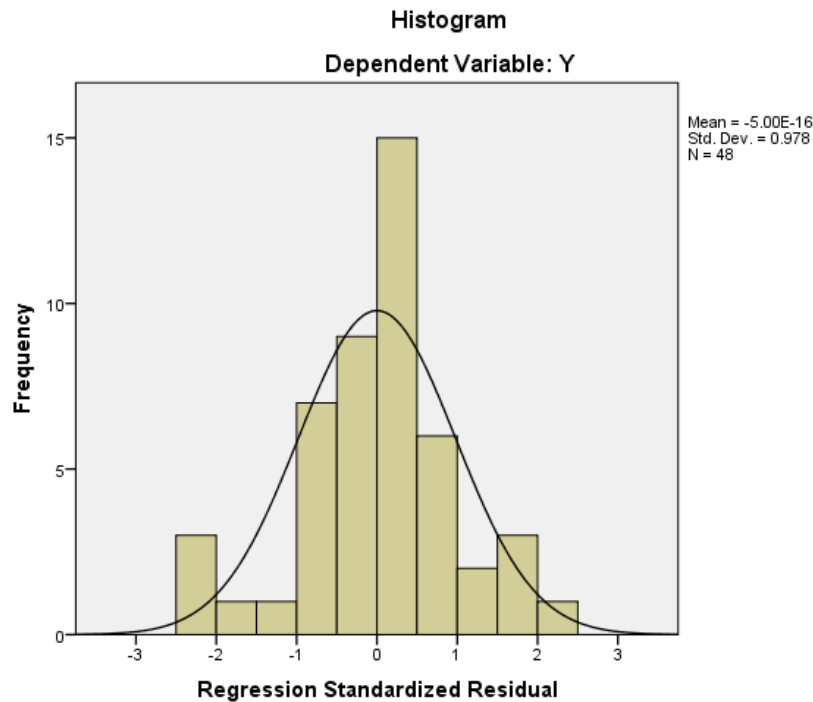
Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan tabel di atas, maka secara keseluruhan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel adalah diatas 0,60. Dengan demikian indikator digunakan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) terbukti reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P *Plot of Regresion Standardized Residual* atau dengan uji *One Sampel Kolmogorov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram diatas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah terdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	48

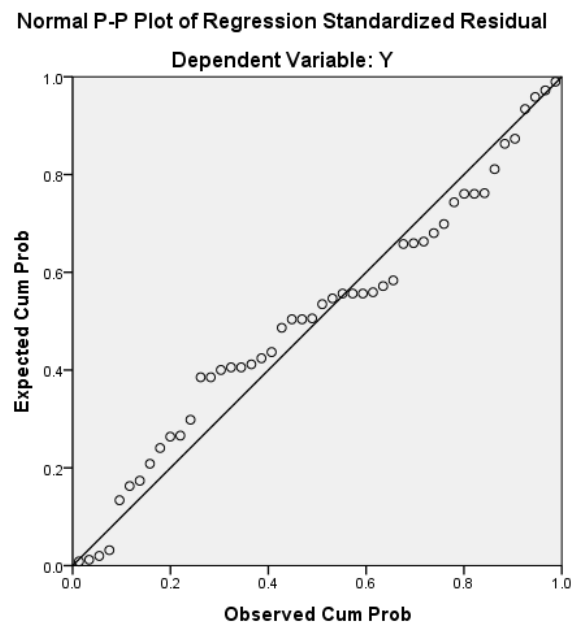
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.93612010
	Absolute	.133
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.920
Asymp. Sig. (2-tailed)		.365

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer olahan spss 20

Dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* nilai *asymptotic significant (2-tailed)* diatas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,365 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.



Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Sumber : data primer olahan spss 20

Tampak pada gambar normal P-P Plot bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis. Maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antara variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi = 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.464	5.922		1.767	.084		
1 X1	.301	.135	.280	2.224	.031	.859	1.164
X2	.459	.125	.461	3.664	.001	.859	1.164

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan tabel 4.12, nilai VIF dari pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X1) adalah 1,164, dan nilai VIF dari kompetensi sumber daya manusia (X2) adalah 1,164. Dikarenakan seluruh nilai VIF < 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya gejala penyakit heteroskedastisitas dapat dilihat dari besarnya nilai

signifikansi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada gejala penyakit heteroskedastisitas. Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas :

Table 4.13
Hasil uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.245	4.040		.061	.952
1 X1	-.044	.092	-.076	-.479	.634
X2	.087	.085	.162	1.020	.313

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu 5% (0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

F. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.464	5.922		1.767	.084		
1 X1	.301	.135	.280	2.224	.031	.859	1.164
X2	.459	.125	.461	3.664	.001	.859	1.164

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer olahan spss 20

Dari nilai-nilai koefisien diatas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Maka :

$$Y = 10,464 + 0,301X_1 + 0,459X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

1. Ketika Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sama dengan nol, maka besarnya variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 10,464. Dengan kata lain jika variabel bebas lainnya dengan nol berarti besarnya variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 10,464.
2. Ketika variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan ditingkatkan sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintahan akan meningkat sebesar 0,301 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (tetap) atau tidak mengalami perubahan.
3. Ketika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ditingkatkan sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintahan akan meningkat sebesar 0,459 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (tetap) atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan adalah hubungan yang positif dimana ketika Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ditingkatkan maka akan berdampak pada kenaikan kualitas laporan keuangan.

G. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji determinan dilakukan untuk melihat

bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Tabel 4.15

Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.388	.361	3.001

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer olahan spss 20

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui nilai koefisien determinan (R-Square) adalah 0,388. Nilai tersebut dapat diartikan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 38,8%, sisanya sebesar 61,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.464	5.922		1.767	.084
	X1	.301	.135	.280	2.224	.031

X2	.459	.125	.461	3.664	.001
----	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer olahan spss 20

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- a. Pengaruh variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,224 dengan signifikan sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 48 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,01410. Kemudian jika dibandingkan $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X1 sebesar 2,224 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,01410 maka keputusannya H_{a1} diterima, artinya bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- b. Pengaruh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan

Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,664 dengan tingkat signifikan sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 48 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan sebesar 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,01410. Kemudian jika dibandingkan $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 sebesar 3,664 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,01410 maka keputusannya H_{a2} diterima, artinya bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F merupakan kelayakan model/alat uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersamaan atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% (0,05).

Tabel 4.17

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	256.635	2	128.317	14.251	.000 ^b
Residual	405.178	45	9.004		
Total	661.813	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data primer olahan spss 20

Dari hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} adalah sebesar 14,251. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah signifikan. Artinya H_{a3} diterima yang menunjukkan secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 14,251 adapun untuk nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 48, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,20 maka F_{hitung} (14,251) lebih besar dari F_{tabel} (3,20) sehingga keputusan H_{a3} diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Y)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini ialah bahwasanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Artinya dengan pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memadai akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Dari tabel 4.16 mengenai tabel uji parsial (Uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,224 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 48 dan variabel bebas sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,01410. Kemudian jika dibandingkan $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X1 sebesar 2,224 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,01410 maka keputusannya H_{a1} diterima, artinya bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana (2014) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jadi dapat dikatakan bahwa, jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Rizki Aulina Nur (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif karena didukung dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu yang paling utama dalam pembuatan laporan keuangan tersebut yaitu pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus memahami standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Y)

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Artinya dengan sumber daya manusia yang berkompeten akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan informasi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Dari tabel 4.16 mengenai tabel uji parsial (Uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,664 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 48 dan variabel bebas sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,01410. Kemudian jika dibandingkan $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 sebesar 3,664 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,01410 maka keputusannya H_{a2} diterima, artinya bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Rizki Aulina Nur (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Pematangsiantar. Hal ini menandakan bahwa kualitas laporan keuangan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Artinya semakin berkualitas seorang pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan

akan menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Setiap OPD harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga para pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah yang disajikan. Hasil pengujian deskriptif juga menunjukkan bahwa rata-rata responden untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia memperoleh nilai yang cukup tinggi.

Hasil uji F dari variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan pemerintahan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan ditemukan pada tabel 4.17 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 14,251. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel 4.17 diperoleh nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah signifikan. Selain itu bisa juga dibandingkan antara nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Jika F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 14,251 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,20, maka F_{hitung} (14,251) lebih besar dari F_{tabel} (3,20) sehingga keputusannya H_{a3} diterima, artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t , terdapat pengaruh positif pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t , nilai signifikan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) adalah sebesar 0,031 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} (2,224) lebih besar dari t_{tabel} (2,01410). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Semakin baik pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan yang di hasilkan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t , terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t , nilai signifikan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) adalah sebesar 0,001 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} (3,664) lebih besar dari t_{tabel} (2,01410). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya

Manusia (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan informasi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar.

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
 Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji F, terdapat pengaruh positif pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F, nilai F_{hitung} (14,251) lebih besar dari F_{tabel} (3,20). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dapat dikatakan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar.

B. Saran

1. Untuk Objek Penelitian
 - a. Diharapkan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar supaya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pegawai bagian keuangan untuk lebih memahami standar akuntansi pemerintahan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan diklat mengenai standar akuntansi pemerintahan.
 - b. Diharapkan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar supaya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pegawai yang berkompeten

dibidangnya, dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan tugas jabatannya.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan disarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan metode angket berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Anggraini. *Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya. Semarang : PT. Toha Putra. 1996
- Basukianto, Febrian Cahyo Pradono. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. *Kualitas Laporan Keuangan*. dalam <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/08/kualitas-laporan-keuangan/>. diakses pada 25 januari 2021.
- Benny, Cornelia J. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi*. Administrasi Pendidikan Vol. III, Nomor 2, Oktober 2005.
- Desipradani, Gita dan Zeni Rusmawati. *Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010*. Balance Vol. XIV No. 2. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Pustaka Agung. 2006.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Burhan*. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani. 2012.
- Erlina et al. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat. cet. 2. 2015.
- Eriadi. *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Di Sumatera Utara Dengan Efektivitas Reviu APIP Sebagai Pemoderasi*. Disertasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2018.
- Gede, Muhammad. *Teori Akuntansi*. Jakarta: almahira. 2005.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : In Media. 2017.
- Harmain, Hendra, et. al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera. 2019.
- Haslinda dan Jamaluddin. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah daerah Kabupaten Wajo*, Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban : Vol. II No.1.2016.
- HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, **shahih**.
- Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Wijaya Saragih. Selaku Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan Balanja Daerah pada BPKD Kota Pematangsiantar. Pada tanggal 5 Februari 2021
- Ikhsan, Arfan, Muhyarsyah, Hasrudi Tanjung, dan Ayu Oktaviani. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Kunto, Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan: UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2017.
- Nordiawan, Deddi, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 2010.
- Nasution, Yenni Samri Juliati dan Amani Raudathul Jannah. *Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 Nomor 1. Desember 2019.
- Purnomo, Rochmat Adi. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS*. Ponorogo: CV Wade Group. 2017.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010.

- Rafid, Rashwan Zuhudy. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sekaran. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Syafi'i, Asrof. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: eLKAF. 2005.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 1999.
- Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press. 2015.
- Silaen, Sakti. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010.
- Sitompul, Mhd. Syahman, Nurlaila Harahap, dan Hendra Harmain. *Akuntansi Masjid*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2015.
- STIE Bukit Zaitun. *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Dalam <http://stiebz.ac.id/?p=531>, diakses pada 27 januari 2021.
- Sihasale, Debby Christin. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang)*. JRMA, Volume 6, No. 1. 2018.
- Simanjuntak, Markus Doddy. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Direksi PT. Pertani (Persero) Medan*. Jurnal Ilmiah Kohesi. Vol. 4 No. 1. Januari 2020.

- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Triyanti. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Atudi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.
- Tanjung, Abdul Hafiz. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Wulandari, Mayang. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Solok Selatan)*. Artikel: Universitas Negeri Padang. 2018.
- Wahyuni, Arnida dan Rinie Utara. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No.1. 2018.

Lampiran I : Data Kuesioner

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden
di tempat

Dengan hormat,

Sehubung dengan penyusunan skripsi program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofiah Isnaini Nasution

NIM : 0502172302

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Skripsi dengan judul
“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar”

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan diri, peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjadi responden kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan kuesioner sangat peneliti hargai. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat terjaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Nofiah Isnaini Nasution

NIM. 0502172302

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, peneliti memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *Checklist* (✓) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
3. Usia : ☐ < 25 ☐ 25 - 35
☐ 36 – 50 ☐ > 50
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMP / SMA ☐ Diploma
☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
5. Latar Belakang Pendidikan :
 - a. Akuntansi ☐
 - b. Manajemen ☐
 - c. Ilmu Ekonomi ☐
 - d. Hukum ☐
 - e. Teknik ☐
 - f. Dan lain-lain ☐
6. Nama OPD :
7. Jabatan :
8. Lama Bekerja : ☐ < 1Tahun
☐ 1–5 Tahun
☐ 6–10 Tahun
☐ >10 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara Pengisian Kuesioner
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda *Checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/I

- b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena peneliti hanya memperhatikan pada satu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara/I
2. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut :
- Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)
- Skor/Nilai 3 : Ragu-Ragu (RR)
- Skor/Nilai 4 : Setuju (S)
- Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

C. Kuesioner Penelitian

1. Kuesioner variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Y)

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai pernyataan berikut:						
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya					
2	Laporan keuangan telah disusun atau disajikan tepat waktu					
3	Laporan keuangan yang dibuat berguna untuk pengambilan keputusan					
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji/diverifikasi kebenarannya					
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi					

	kebutuhan umum dan tidak berpihak kebutuhan tertentu					
6	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya untuk kebijakan akuntansi yang sama					
7	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan					
8	Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami					
9	Laporan keuangan yang disajikan harus sepenuhnya sudah memenuhi persyaratan normatif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku					
10	Laporan keuangan menyajikan informasi tentang sumber dan alokasi dana secara jujur					

2. Kuesioner variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai pernyataan berikut :						
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Neraca					
2	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					
3	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami					

	mengenai Laporan Arus Kas (LAK)					
4	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)					
5	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Persediaan					
6	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Investasi					
7	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Aset Tetap					
8	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Kontruksi dalam Pengerjaan					
9	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Kewajiban					
10	Bapak/Ibu/Saudara/I memahami mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa					

3. Kuesioner variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai pernyataan berikut :						
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Semua SDM yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan harus memiliki pemahaman tentang akuntansi					
2	Seluruh SDM yang ditugasi menyusun laporan keuangan telah menguasai tugasnya masing-masing					
3	Seluruh SDM penyusunan laporan					

	keuangan telah mengikuti pelatihan untuk dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan keuangan					
4	Tenaga SDM penyusunan laporan keuangan seluruhnya mempunyai kemampuan untuk memahami aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan					
5	Tenaga SDM bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan					
6	SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan kurang mengerti atau memahami standar akuntansi pemerintahan					
7	Penyusun laporan keuangan harus berlatar belakang pendidikan akuntansi					
8	SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus selalu mendapatkan sosialisasi peraturan baru					
9	Laporan keuangan harus disajikan dengan penuh tanggung jawab					
10	SDM pada bagian penata keuangan harus memiliki kemampuan yang memadai					

Lampiran II : Hasil Tabulasi Responden

A. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Responden	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	3	4	4	4	4	1	5	4	4	4	37
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
3	3	5	5	4	5	3	5	3	5	3	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	5	5	5	5	5	3	5	3	44
6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
8	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	37
9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
10	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	45
11	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	4	4	2	4	4	4	4	3	4	38
16	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	41
17	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	47
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	46
24	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	47
25	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	45
26	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
27	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	41
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
29	4	5	3	4	5	4	3	4	4	4	40
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
32	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

34	4	4	4	3	1	3	4	3	4	3	33
35	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	41
36	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	42
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
38	4	4	5	4	3	5	4	4	4	1	38
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3	35
41	5	3	3	3	3	3	3	4	5	5	37
42	4	5	5	5	3	2	5	5	5	2	41
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
46	5	4	3	3	3	3	4	5	3	3	36
47	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

B. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Respon den	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)										Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	43
10	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
11	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
12	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	34
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
15	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36

21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	42
23	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	46
24	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	46
25	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
32	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	3	4	4	4	4	3	5	5	4	40
35	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43
36	5	4	4	5	4	4	4	3	3	4	40
37	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	45
38	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	46
39	4	5	5	4	4	4	3	5	5	3	42
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	46
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	3	4	3	3	4	3	3	5	5	3	36
46	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
47	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
48	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	43

C. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Respon den	Kualitas Laporan Keuangan (Y)										Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	5	46
6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41

8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	5	5	4	4	4	3	2	4	39
10	4	5	4	3	5	5	5	4	4	4	43
11	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	44
12	5	4	3	4	3	4	3	3	3	3	35
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	37
16	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	44
17	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
19	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
20	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	36
21	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
22	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
23	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	47
24	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
25	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	47
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
29	5	4	5	5	5	5	4	2	4	4	43
30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
31	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
32	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
33	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
34	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
35	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	43
36	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
37	5	4	4	3	3	3	3	4	3	4	36
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	5	2	5	5	3	5	5	5	4	5	44
42	5	3	3	3	3	4	3	4	3	4	35
43	5	3	5	3	4	4	5	5	3	3	40
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	5	4	3	4	3	4	5	3	3	5	39
46	4	3	4	4	5	3	5	3	3	5	39

47	3	4	4	4	5	4	5	5	3	5	42
48	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48

Lampiran III : Hasil Uji Validitas

A. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.197	.158	.030	.026	.504**	.266	.476**	.267	.339*	.587**
	Sig. (2-tailed)		.180	.283	.837	.860	.000	.068	.001	.066	.018	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.2	Pearson Correlation	.197	1	.344*	.147	.051	.111	.402**	.259	.206	.047	.513**
	Sig. (2-tailed)	.180		.017	.319	.730	.451	.005	.075	.161	.751	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.3	Pearson Correlation	.158	.344*	1	.371**	.129	.302*	.520**	.327*	.403**	-.108	.618**
	Sig. (2-tailed)	.283	.017		.010	.381	.037	.000	.023	.004	.467	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.4	Pearson Correlation	.030	.147	.371**	1	.354*	.287*	.442**	.123	.520**	-.032	.576**
	Sig. (2-tailed)	.837	.319	.010		.014	.048	.002	.405	.000	.830	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.5	Pearson Correlation	.026	.051	.129	.354*	1	.230	.101	.010	.160	.122	.415**
	Sig. (2-tailed)	.860	.730	.381	.014		.116	.493	.948	.277	.407	.003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.6	Pearson Correlation	.504**	.111	.302*	.287*	.230	1	.221	.096	.186	.248	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.451	.037	.048	.116		.132	.515	.206	.089	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.7	Pearson Correlation	.266	.402**	.520**	.442**	.101	.221	1	.215	.465**	.093	.670**

	Sig. (2-tailed)	.068	.005	.000	.002	.493	.132		.142	.001	.528	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson Correlation	.476**	.259	.327*	.123	.010	.096	.215	1	.135	.168	.482**
X1.8	Sig. (2-tailed)	.001	.075	.023	.405	.948	.515	.142		.359	.253	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson Correlation	.267	.206	.403**	.520**	.160	.186	.465**	.135	1	.098	.607**
X1.9	Sig. (2-tailed)	.066	.161	.004	.000	.277	.206	.001	.359		.507	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson Correlation	.339*	.047	-.108	-.032	.122	.248	.093	.168	.098	1	.390**
X1.10	Sig. (2-tailed)	.018	.751	.467	.830	.407	.089	.528	.253	.507		.006
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson Correlation	.587**	.513**	.618**	.576**	.415**	.611**	.670**	.482**	.607**	.390**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.001	.000	.006	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Correlations												
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TOTAL	
X2.1	Pearson Correlation	1	.525**	.660**	.693**	.495**	.537**	.617**	.235	.048	.646**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.108	.748	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.2	Pearson Correlation	.525**	1	.484**	.616**	.443**	.446**	.471**	.233	.194	.240	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.001	.001	.111	.187	.101	.000

	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.660**	.484**	1	.683**	.634**	.677**	.452**	.372**	.183	.643**	.815**
	Correlation											
X2.3	Sig. (2-	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.009	.214	.000	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.693**	.616**	.683**	1	.481**	.545**	.560**	.169	.056	.589**	.738**
	Correlation											
X2.4	Sig. (2-	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.251	.707	.000	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.495**	.443**	.634**	.481**	1	.762**	.617**	.298*	.123	.658**	.767**
	Correlation											
X2.5	Sig. (2-	.000	.002	.000	.001		.000	.000	.040	.406	.000	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.537**	.446**	.677**	.545**	.762**	1	.637**	.200	.049	.744**	.773**
	Correlation											
X2.6	Sig. (2-	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.173	.743	.000	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.617**	.471**	.452**	.560**	.617**	.637**	1	.007	-.009	.744**	.691**
	Correlation											
X2.7	Sig. (2-	.000	.001	.001	.000	.000	.000		.963	.954	.000	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.235	.233	.372**	.169	.298*	.200	.007	1	.685**	.197	.569**
	Correlation											
X2.8	Sig. (2-	.108	.111	.009	.251	.040	.173	.963		.000	.179	.000
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.048	.194	.183	.056	.123	.049	-.009	.685**	1	.052	.419**
	Correlation											
X2.9	Sig. (2-	.748	.187	.214	.707	.406	.743	.954	.000		.723	.003
	tailed)											
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Pearson	.646**	.240	.643**	.589**	.658**	.744**	.744**	.197	.052	1	.768**
	Correlation											
X2.10	Sig. (2-	.000	.101	.000	.000	.000	.000	.000	.179	.723		.000
	tailed)											

	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL	Pearson Correlation	.761**	.644**	.815**	.738**	.767**	.773**	.691**	.569**	.419**	.768**	1
AL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Correlations											
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	TOTAL
Y.1	1	-.098	.348*	.301*	-.258	.231	.079	.028	.208	.172	.320*
	Pearson Correlation										
	Sig. (2-tailed)										
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.2	-.098	1	.110	.236	.270	.269	.053	-.005	.382**	.058	.362*
	Pearson Correlation										
	Sig. (2-tailed)										
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.3	.348*	.110	1	.647**	.208	.399**	.381**	.294*	.430**	.419**	.721**
	Pearson Correlation										
	Sig. (2-tailed)										
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.4	.301*	.236	.647**	1	.286*	.607**	.328*	.152	.474**	.580**	.772**
	Pearson Correlation										
	Sig. (2-tailed)										
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.5	-.258	.270	.208	.286*	1	.312*	.218	.187	.188	.180	.458**
	Pearson Correlation										
	Sig. (2-tailed)										
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Y.6	Pearson Correlation	.231	.269	.399**	.607**	.312*	1	.361*	.222	.505**	.379**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.114	.065	.005	.000	.031		.012	.130	.000	.008	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.7	Pearson Correlation	.079	.053	.381**	.328*	.218	.361*	1	.356*	.351*	.611**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.595	.720	.008	.023	.137	.012		.013	.014	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.8	Pearson Correlation	.028	-.005	.294*	.152	.187	.222	.356*	1	.413**	.343*	.520**
	Sig. (2-tailed)	.853	.973	.043	.301	.202	.130	.013		.004	.017	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.9	Pearson Correlation	.208	.382**	.430**	.474**	.188	.505**	.351*	.413**	1	.475**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.157	.007	.002	.001	.201	.000	.014	.004		.001	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.10	Pearson Correlation	.172	.058	.419**	.580**	.180	.379**	.611**	.343*	.475**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.243	.697	.003	.000	.221	.008	.000	.017	.001		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL	Pearson Correlation	.320*	.362*	.721**	.772**	.458**	.710**	.634**	.520**	.740**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.011	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran IV : Hasil Uji Reliabilitas

A. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.729	10

B. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.861	10

C. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.798	10

Lampiran V : Tabel r

DISTRIBUSI NILAI r_{tabel} SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran VI : Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran VII : Tabel f

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JALAN MERDEKA NOMOR 6 TELEPHON (0622) 27919
PEMATANGSIANTAR

Nomor : 895.4/ 64 /Bapp/II/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Pematangsiantar, 04 Februari 2021

Kepada :

Yth .

di -

PEMATANGSIANTAR

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-0529/EB.IV.2/KS.02/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 hal Izin Riset dan setelah mempelajari Dokumen Proposal Penelitian, maka dengan ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar memberikan Surat Izin Penelitian kepada :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	NOFIAH ISNAINI NASUTION	0502172302	Akuntansi Syariah

Sekaitan dengan hal tersebut, bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu Pejabat/Pimpinan SKPD agar dapat memfasilitasi yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan ketentuan/peraturan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



MUHAMMAD HAMMAM SHOLEH, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730228 199402 1 002

Tembusan :

1. Walikota Pematangsiantar, sebagai laporan;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JALAN MERDEKA NOMOR 6 TELEPHON (0622) 27919
PEMATANGSIANTAR

SURAT IZIN PENELITIAN
No. 895.4/ 67 /Bapp/1/2021

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-0529/EB.IV.2/KS.02/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 hal Izin Riset dan setelah mempelajari Dokumen Proposal Penelitian, maka dengan ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : **NOFIAH ISNAINI NASUTION**
Alamat : Jl. Pisang Kipas Gg. Damai No. 5 Kel. Bah Sorma
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
Lokasi Penelitian : OPD se-Kota Pematangsiantar
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Penanggungjawab : Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution, MA

Untuk melakukan Penelitian di SKPD/Instansi/Lembaga terkait di Kota Pematangsiantar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian, peneliti terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan SKPD/Instansi/Lembaga terkait yang akan dijadikan obyek lokasi Penelitian untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah, menaati Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di obyek Penelitian dilaksanakan;
3. Surat Izin Penelitian dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Peneliti tidak menaati atau mengindahkan Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku;
 - b. Surat Keterangan tidak diterbitkan oleh SKPD/Lembaga lainnya yang menjadi Lokasi Obyek Penelitian;
 - c. Peneliti bersangkutan dalam masalah hukum pada saat melakukan proses Penelitian berlangsung;
4. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian harus menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar dan SKPD/Lembaga yang menjadi obyek Penelitian paling lama 1 (satu) bulan setelah Penelitian dilaksanakan;
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku tiga bulan setelah tanggal penetapan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Bersedia Memenuhi Ketentuan Butir 1 s.d 5



Pemegang Izin Penelitian

NOFIAH ISNAINI NASUTION



MUHAMMAD HAMAM SHOLEH, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730228 199402 1 002

1. Walikota Pematangsiantar, sebagai laporan;
2. Kepala OPD se-Kota Pematangsiantar;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan;
4. Yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NOFIAH ISNAINI NASUTION**
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pisang Kipas Gg. Damai No. 5 Kelurahan Bah Sorma
No. Telepon : 0821 6522 5166
Alamat PT/Lembaga Lainnya : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No Telp/Fax : (061) 6615683
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Penanggung Jawab : Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution, MA

Dengan ini menyatakan :

1. Saya sanggup dan bersedia untuk menyerahkan hasil kegiatan penelitian kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan penelitian selesai sebanyak 1 (satu) eksemplar.
2. Surat pernyataan ini sebagai syarat untuk memperoleh izin penelitian yang saya lakukan di wilayah Kota Pematangsiantar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pematangsiantar, 04 Februari 2021
Yang membuat Pernyataan

NOFIAH ISNAINI NASUTION


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri Penulis

Nama : Nofiah Isnaini Nasution
NIM : 0502172302
Tempat,Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 09 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Jl. Pisang Kipas Gg. Damai No. 5 Kota Pematangsiantar
No. Telepon : 0821-6522-5166
Email : nofiahisnaini22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004 - 2005 : RA Al-Quran Iqra' Pematangsiantar
2. Tahun 2005 - 2011 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pematangsiantar
3. Tahun 2011 - 2014 : MTs.N Pematangsiantar
4. Tahun 2014 - 2017 : MAN Pematangsiantar
5. Tahun 2017 - 2021 : S1 Akuntansi Syariah UINSU Medan

Riwayat Organisasi

1. 2014 – 2015 : MANPALA di Aliyah
2. 2018 – 2020 : LDK Al-Izzah UINSU
3. 2018 – 2020 : IMSTAR Komisariat UINSU

Pengalaman Magang

2021 : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar